
Sejarah Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama Di Indonesia (2014-2020)

Achmad Seftian¹⁾, Taufik²⁾ & Tundjung³⁾
Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia^{1,2,3)}

ABSTRACT

This articles explores the factors, contributions, and challenges of Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) in Indonesia from 2014 to 2020. SPK schools, combining national and international curricula, have expanded in major cities, offering global education alternatives. They promote diverse learning pathways and global competencies, but SPK schools face issues such as curriculum integration, language barriers, and a shortage of qualified teachers. The study underscores the need for policies that balance international standards with national identity to support inclusive and high-quality education

Key Words: Cooperative Education Unit (SPK), international curriculum, national education, global education, education policy

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pertumbuhan, kontribusi, dan tantangan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Indonesia pada periode 2014 hingga 2020. Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama yang menggabungkan kurikulum nasional dan internasional telah berkembang di kota-kota besar, menawarkan alternatif pendidikan global. Sekolah-sekolah ini mendorong keberagaman jalur pembelajaran dan penguatan kompetensi global, namun dalam pelaksanaannya, sekolah-sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama menghadapi tantangan seperti integrasi kurikulum, kendala bahasa, dan kekurangan guru yang berkualitas. Studi ini menekankan pentingnya kebijakan yang mampu menyeimbangkan standar internasional dengan penguatan identitas nasional guna mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi

Kata Kunci: Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), kurikulum internasional, pendidikan nasional, pendidikan global, kebijakan pendidikan

Penulis Korespondensi: (1) Achmad Seftian, (2) Universitas Indraprasta PGRI, (3) Kampus A. TB. Simatupang, Jl. Nangka Raya No.58C. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa - Jakarta Selatan - Indonesia, (4) Email: achmadseftian89@gmail.com

Copyright © 2026. The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), sistem pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan baru yang signifikan. SPK merupakan bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan melalui kerja sama antara lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan nasional, dengan mengacu pada standar dan kurikulum pendidikan internasional dan nasional. Kemunculan SPK tidak hanya membuka peluang bagi peserta didik Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dengan kurikulum internasional tetapi juga menciptakan tantangan dalam konteks pengelolaan pendidikan nasional. (Permendikbud No 31 tahun 2014)

Latar belakang pembentukan SPK berakar pada kebutuhan untuk meningkatkan daya saing pendidikan di Indonesia di tengah meningkatnya globalisasi dan integrasi internasional. Dengan sistem pendidikan yang mengadopsi pendekatan kurikulum internasional, SPK diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk bersaing secara global sekaligus menjaga nilai-nilai lokal melalui pendidikan karakter yang berbasis Pancasila. Namun, di sisi lain, keberadaan SPK memunculkan berbagai isu, seperti kesenjangan akses pendidikan, tantangan akreditasi, dan penyesuaian dengan regulasi pemerintah.

Meskipun bekerja sama dengan lembaga pendidikan asing, sekolah SPK wajib mengadopsi kurikulum nasional Indonesia dalam pelaksanaannya. Kurikulum sekolah SPK harus tetap mengacu pada Permendiknas 22 tahun 2006 tentang standar isi, dan Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, yang menuntut setiap sekolah melakukan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Masih tingginya minat orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah internasional membuat sekolah SPK juga harus memiliki kualitas yang bertaraf internasional tersebut ditunjukkan oleh kurikulum yang secara teratur disempurnakan. Penyempurnaan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala. Penyempurnaan mencakup peningkatan kualitas materi ajar, penyesuaian jadwal pembelajaran, serta penguatan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop. Tujuan dari penyempurnaan ini adalah untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dan mampu memenuhi tuntutan pendidikan global. (Wulaningrum, dkk, 2025: 12).

Dalam rentang waktu 2014 hingga 2020, SPK mengalami perkembangan yang pesat baik dari segi jumlah maupun cakupan wilayah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah sekolah SPK meningkat secara signifikan di kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang Selatan, Surabaya, dan Bandung. Sekolah-sekolah ini banyak diminati oleh masyarakat menengah ke atas yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pendekatan internasional. Kurikulum yang diterapkan, seperti Cambridge, International Baccalaureate (IB), atau kurikulum nasional dengan modifikasi, memberikan daya tarik tersendiri. Selain itu, guru-guru yang bekerja di SPK biasanya memiliki kualifikasi internasional, sehingga menambah nilai eksklusivitas dari sekolah-sekolah ini. (Teguh, 2010: 14)

Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana SPK dapat mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum internasional yang mereka terapkan. Hal ini penting agar pendidikan yang diberikan tidak hanya mencetak lulusan yang kompetitif di tingkat global, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang identitas kebangsaan mereka. Selain itu, pengelolaan SPK seringkali menghadapi kendala administratif, seperti perizinan, pembiayaan, dan kesesuaian antara standar internasional dan nasional. Faktor-faktor ini sering kali menjadi perhatian bagi para pemangku kebijakan, terutama dalam memastikan bahwa keberadaan SPK tidak memperbesar ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Di sisi lain, SPK juga memberikan dampak positif dalam hal inovasi pembelajaran dan pertukaran budaya. Sekolah-sekolah ini menjadi contoh praktik terbaik dalam penerapan teknologi pendidikan, pengajaran berbasis proyek, serta evaluasi berbasis kompetensi. Selain itu,

peserta didik yang bersekolah di SPK memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke universitas-universitas ternama di luar negeri, yang tentunya dapat memberikan kontribusi balik kepada Indonesia dalam bentuk keahlian dan pengetahuan.

Artikel ini difokuskan pada sejarah, kontribusi dan tantangan-tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) dalam pelaksanaannya. Sekolah SPK, sebagai entitas pendidikan yang mengadopsi kurikulum internasional dengan tetap mempertahankan kurikulum nasional, telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini memunculkan berbagai dinamika dalam implementasinya, baik dari segi kebijakan, operasional, maupun pengaruhnya terhadap standar pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keberadaan sekolah SPK memberikan dampak terhadap sistem pendidikan nasional, baik dalam hal kualitas pendidikan, aksesibilitas, maupun implikasi sosial dan ekonomi.

Untuk memberikan ruang lingkup yang jelas dan terfokus, peneliti membatasi kajian ini pada periode waktu tahun 2014 hingga tahun 2020. Pemilihan rentang waktu tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis. Pertama, tahun 2014 menjadi tonggak penting karena keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang keberadaan dan penyelenggaraan sekolah SPK di Indonesia. Kedua, tahun 2020 dipilih sebagai batas akhir karena menandai awal era pandemi COVID-19 yang secara signifikan mengubah lanskap pendidikan global, termasuk di Indonesia.

Pembatasan ini dimaksudkan agar penelitian lebih fokus pada periode stabil sebelum adanya perubahan besar akibat pandemi. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi pola perkembangan dan dampak sekolah SPK secara lebih mendalam dan terstruktur. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami peran sekolah SPK dalam mendukung sistem pendidikan nasional, serta menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dengan demikian, periode 2014 hingga 2020 menjadi fase awal yang menarik untuk dikaji, karena mencerminkan masa transisi dan adaptasi SPK terhadap regulasi pemerintah serta dinamika kebutuhan masyarakat. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis tetapi juga rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka artikel ini mengkaji “Sejarah Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2020” yang berfokus pada beberapa rumusan masalah berikut;

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berdirinya Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama?
2. Bagaimana eksistensi Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama memberikan dampak bagi sistem pendidikan nasional Indonesia?
3. Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh Satuan Pendidikan Kerja Sama dalam perkembangannya?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). (Kuntowijoyo, 2003: 67).

Pada tahap heuristik, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan sumber-sumber. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan peristiwa sejarah yang sedang diteliti, seperti dokumen asli, surat kabar pada masa kejadian, arsip resmi, wawancara tokoh sejarah yang terlibat dan sumber terkait lainnya. Sumber ini memiliki nilai autentik karena memberikan gambaran langsung tentang apa yang terjadi pada waktu itu.

Misalnya, surat kabar yang terbit pada saat suatu peristiwa penting terjadi dapat memberikan perspektif kontemporer yang sangat berharga dalam memahami peristiwa tersebut. Selain sumber primer, penelitian ini juga akan mengandalkan sumber sekunder, yang berupa karya-karya yang ditulis setelah peristiwa tersebut terjadi, seperti buku, artikel, tesis, dan jurnal ilmiah. Sumber sekunder ini sering kali memberikan analisis, interpretasi, dan konteks yang lebih luas mengenai peristiwa sejarah yang diteliti. Peneliti akan menggunakan sumber sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh tentang topik yang sedang dikaji.

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan kritik terhadap sumber yang telah didapatkan. Kritik tersebut dilakukan untuk menguji otentisitas dan kredibilitas sumber tersebut. Langkah selanjutnya adalah pemahaman data. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan isi sumber untuk mendapatkan fakta-fakta yang dapat digunakan untuk merekonstruksi sejarah yang akan ditulis. Interpretasi yang digunakan adalah dengan cara melakukan analisis terhadap sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Interpretasi dimulai dengan cara melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari sumber sejarah. Peneliti perlu mempertimbangkan konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi pada saat peristiwa tersebut terjadi, serta perspektif yang dimiliki oleh penulis atau pembuat sumber.

Tahapan yang terakhir adalah penulisan sejarah atau historiografi. Pada tahap ini, fakta-fakta yang telah didapatkan kemudian diseleksi dan disusun secara kronologis dan sistematis. Penulisan sejarah dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif naratif yang banyak menguraikan kejadian dalam dimensi ruang dan waktu dan mengacu pada aspek kronologis dan sistematis sehingga bentuk tulisan terlihat logis, jelas dan kredibel.

Dengan melakukan metode penelitian sejarah, penulis dapat memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai bagaimana suatu peristiwa berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana berbagai faktor yang saling terkait mempengaruhi jalannya sejarah. Penelitian ini sendiri dilaksanakan di sekolah-sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama yang berada di dalam wilayah Indonesia. Sekolah-sekolah yang dimaksud antara lain; Global Jaya School Bintaro, Manado Independent School, dan sekolah-sekolah lainnya.

HASIL DAN DISKUSI

Menurut informasi yang termuat dalam situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Satuan Pendidikan Kerja Sama adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi/diakui di negaranya atau Lembaga Pendidikan di Indonesia pada jalur formal dan nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lembaga pendidikan yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah lembaga pendidikan asing yang diakui secara resmi di negara asalnya, dan lembaga pendidikan di Indonesia. Aturan tersebut tertuang melalui Permendikbud No. 31 tahun 2014 serta peraturan teknis Dirjen Dikdas dan Dikmen, yang mewajibkan sekolah internasional mengganti status menjadi SPK sejak 1 Desember 2014.

Pembahasan mengenai Satuan Pendidikan Kerja Sama tidak terlepas dari definisi pendidikan itu sendiri. Pendidikan secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, Paedagogy, yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah dengan diantar oleh seorang pelayan. Pelayan yang mengantar dan menjemput tersebut dinamakan Paedagogos. Namun, makna ini tidak terbatas pada tugas fisik saja; Paedagogos juga sering bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan moral dan mendidik anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Dari akar kata ini, pendidikan berkembang menjadi konsep yang lebih luas dan mencakup seluruh upaya membentuk karakter, intelektual, serta keterampilan individu.

Pendidikan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 juga menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Artinya, pendidikan harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan

bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Hal ini menuntut adanya metode pembelajaran yang inklusif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. (Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2013)

Sedangkan menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan, mendapat kemajuan hidup lahir batin. (Suparlan, 2014: 73) Pandangan Ki Hadjar menempatkan anak didik sebagai subjek utama pendidikan, yang harus diberdayakan sesuai dengan potensi dan karakter uniknya. Pendidikan tidak boleh memaksakan nilai atau keterampilan yang bertentangan dengan kodrat individu, melainkan harus memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang secara alami. Dalam hal ini, peran pendidik adalah sebagai pembimbing, bukan pengendali. Pendidik harus menciptakan lingkungan yang kondusif agar proses pertumbuhan jiwa dan raga anak berjalan selaras. (Suparlan, 2014:73)

Dalam konteks Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), ketiga teori ini saling melengkapi dan memberikan landasan untuk membangun sistem pendidikan yang holistik. SPK, yang menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum internasional, dapat memanfaatkan pandangan Paedagogy untuk memastikan bimbingan personal bagi peserta didik dalam lingkungan lintas budaya. UU Sistem Pendidikan Nasional memberikan kerangka kerja untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, moralitas, dan spiritualitas dalam pembelajaran, meskipun dalam format yang fleksibel. Sementara itu, prinsip Ki Hadjar Dewantara relevan dalam mendukung pendekatan berbasis budaya lokal, yang penting untuk menjaga identitas nasional dalam konteks globalisasi. Implementasi di SPK mencakup penggunaan metode pembelajaran interaktif, pengembangan karakter berbasis budaya, dan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis. Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan ini, SPK mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk tantangan global tetapi juga menanamkan nilai-nilai lokal yang membangun jati diri bangsa.

Sistem pembelajaran yang digunakan oleh Satuan Pendidikan Kerja Sama tidaklah terlepas dari implementasi kurikulum yang diadopsi oleh sekolah-sekolah SPK. Para ahli pendidikan memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai definisi kurikulum. Misalnya, J. Galen Saylor dan William M. Alexander menyatakan bahwa kurikulum mencakup semua upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mendorong proses belajar peserta didik, baik yang berlangsung di dalam kelas, di lingkungan sekolah, maupun di luar sekolah. Dengan demikian, kurikulum memiliki cakupan yang luas karena mencakup seluruh pengalaman belajar peserta didik yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Harold B. Albery dalam bukunya *Reorganizing the High School Curriculum*, kurikulum tidak hanya mencakup mata pelajaran yang diajarkan di kelas, tetapi juga melibatkan berbagai kegiatan lain di dalam maupun di luar kelas yang menjadi tanggung jawab sekolah. Pandangan ini menegaskan bahwa kurikulum memiliki cakupan yang luas, mencakup semua aktivitas pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah maupun guru, tidak terbatas pada pelajaran formal saja. (Masykur, 2019: 11)

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa latin yaitu *curir* yang berarti pelari dan *curere* yang berarti tempat berlari. (Suparman, 2023: 99) Dalam konteks awalnya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan lintasan atau jalur yang harus dilalui seorang pelari hingga mencapai garis akhir. Makna simbolis dari istilah ini kemudian diadaptasi ke dalam dunia pendidikan sebagai sebuah "lintasan" yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dengan demikian, kurikulum mencakup semua pengalaman, kegiatan, dan pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 butir 19, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (UU No 20 Tahun 2003). Definisi ini menunjukkan bahwa kurikulum bukan sekadar daftar materi ajar, tetapi sebuah kerangka kerja terintegrasi yang dirancang untuk memandu proses pendidikan secara sistematis dan terarah.

Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai panduan bagi pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, sekaligus sebagai acuan untuk mengevaluasi keberhasilan proses pendidikan. Kurikulum juga harus dirancang secara fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan teknologi, dan dinamika masyarakat.

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah kerangka terstruktur yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pendidikan. Kurikulum tidak hanya mencerminkan tujuan pendidikan tetapi juga menjadi sarana atau media untuk menghubungkan berbagai komponen pendidikan, seperti kebutuhan individu peserta didik, aspirasi masyarakat, serta visi misi bangsa dan negara. Dalam konteks implementasi SPK, pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keselarasan antara standar internasional dan nilai-nilai lokal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan global tanpa kehilangan identitas nasional.

Kurikulum yang digunakan di SPK mengikuti Permendikbud No 31 tahun 2014. Permendikbud No 31 tahun 2014 Pasal 11 mengatur tentang kurikulum bagi SPK.

1. Kurikulum disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi Kurikulum yang dapat diperkaya kurikulum satuan pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau dapat menggunakan kurikulum negara lain setelah memperoleh izin menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Kurikulum pada SPK untuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat disusun dalam sistem kredit semester.
3. Kurikulum yang diberlakukan bagi peserta didik WNI wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bagi peserta didik WNA wajib diajarkan Bahasa Indonesia dan Budaya Indonesia (Indonesian Studies). (Widodo, 2017: 7)

Menurut pihak kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada beberapa aturan terkait kurikulum dan kepeserta didikan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh SPK di Indonesia. Secara kurikulum, SPK mengikuti standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau sistem pendidikan yang berlaku di negara lain, setelah memperoleh persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu, SPK wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (sekarang Pendidikan Pancasila), dan Bahasa Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan bagi warga negara Indonesia, dan pembelajaran budaya Indonesia bagi warga negara asing.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berdirinya Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) resmi dibentuk pada tahun 2014. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) dibentuk sebagai respons terhadap peraturan yang mengharuskan sekolah berlabel internasional di Indonesia untuk berganti status menjadi SPK, seiring dengan larangan penggunaan nama "internasional" untuk sekolah. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Hamid Muhammad, mulai 1 Desember 2014, seluruh sekolah berlabel internasional di Indonesia harus

mengganti nama menjadi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Jika pemenuhan persyaratan pembentukan SPK tidak terpenuhi hingga tenggat yang telah ditentukan, sekolah tersebut harus diubah menjadi sekolah nasional atau ditutup. (Hamid, 2015)

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Perkumpulan Sekolah SPK di Indonesia, saat ini terdapat 437 sekolah yang terdaftar sebagai Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah SPK ini tersebar di berbagai wilayah, dengan 44 sekolah di wilayah Sumatera, 340 sekolah di wilayah Jawa, 48 sekolah di wilayah Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, serta 5 sekolah di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Penyebaran ini menunjukkan bahwa SPK telah hadir secara signifikan di berbagai daerah di Indonesia, meskipun konsentrasi terbesar berada di Jawa. Selain itu, berdasarkan informasi yang tersedia di situs resmi Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tercatat ada 100.276 guru yang mengajar di sekolah-sekolah SPK. Angka ini mencerminkan kontribusi besar para tenaga pendidik dalam membentuk kualitas pendidikan di tingkat SPK, yang memiliki standar pendidikan internasional dan sering kali menggunakan kurikulum internasional seperti Cambridge atau International Baccalaureate (IB).

Jumlah peserta didik yang terdaftar di sekolah-sekolah SPK juga cukup signifikan, yaitu sekitar 963.099 orang. Hal ini menunjukkan adanya permintaan yang tinggi terhadap pendidikan berbasis internasional di Indonesia, dengan banyaknya orangtua yang memilih sekolah SPK untuk memberikan anak-anak mereka pengalaman belajar yang berstandar internasional.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa sekolah-sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama di Indonesia berkembang pesat, dengan jumlah sekolah, guru, dan peserta didik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Keberadaan sekolah SPK ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi sistem pendidikan Indonesia, dengan memperkenalkan standar pendidikan yang lebih tinggi dan global. (Kusmayanti, 2024: 5)

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, penyelenggaraan sekolah internasional di Indonesia pertama kali diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP/817/PD/X/75; Nomor 060/O/1975; dan Nomor Kep-354a/ MK/II/4/1975. Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut, definisi “Sekolah Internasional adalah sekolah asing yang didirikan dan diselenggarakan suatu yayasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan Indonesia, untuk keperluan pendidikan dan pengajaran terutama bagi anak-anak warga negara asing bukan anggota perwakilan diplomatik/konsuler suatu negara lain di Indonesia.” Pembinaan sekolah ini berada langsung di bawah pengawasan Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Hendriani, 2018: 17)

Sebelum munculnya konsep Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), pemerintah Indonesia lebih dulu meluncurkan program Sekolah Berstandar Internasional (SBI) pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi program ini diperkuat dengan diterbitkannya Permendikbud No. 78 Tahun 2009 yang mengatur pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Kebijakan ini mendorong lahirnya banyak sekolah berlabel internasional, khususnya yang dikelola pihak swasta. Sekolah-sekolah tersebut menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum internasional seperti Cambridge, International Baccalaureate, atau lainnya yang diakui secara global, dengan tujuan memberikan pendidikan berwawasan global tanpa meninggalkan identitas lokal.

Namun, pelaksanaan program RSBI/ SBI menghadapi sejumlah kendala, seperti ketimpangan akses antara sekolah berstandar internasional dan sekolah umum, tingginya biaya pendidikan, serta kritik terkait minimnya perhatian terhadap nilai-nilai lokal. Dikutip dari situs

resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, akhirnya pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan program ini karena dianggap melanggar prinsip keadilan dalam pendidikan. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013)

Sebagai tindak lanjut, pemerintah memperkenalkan Satuan Pendidikan Kerja Sama sebagai pendekatan yang lebih terstruktur dan inklusif. SPK dirancang untuk menjembatani kebutuhan pendidikan internasional dengan tetap menjunjung tinggi standar dan nilai-nilai pendidikan nasional. Sejak penghapusan istilah “sekolah internasional” pada 2014, SPK menjadi solusi yang memungkinkan sekolah tetap menawarkan pendidikan berstandar global, tetapi dengan regulasi dan pengawasan pemerintah. Sekolah yang ingin menyandang status SPK diwajibkan bekerja sama dengan lembaga pendidikan asing yang telah terakreditasi, menerapkan kurikulum nasional untuk mata pelajaran tertentu, serta menaati ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada umumnya sekolah SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) memiliki visi misi berwawasan global dan komitmen dengan mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut dikarenakan hanya dengan melengkapi sarana dan prasarana itulah sebagai penunjang utama dalam mengembangkan Satuan Pendidikan Kerja Sama. Dikarenakan sekolah SPK sudah berangkat dari sekolah internasional atau memulainya dengan sudah terakreditasi A, maka perihal sarana dan prasarana bukan menjadi halangan bagi sekolah berlabel SPK ini. Tentunya sekolah-sekolah berlabel SPK akan mengembangkan kurikulumnya dengan mengadopsi kurikulum internasional, seperti Cambridge atau IB (International Baccalaureate). (Supatmin, 2021: 6)

Keberadaan sekolah SPK menjadi fenomena yang menarik dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Di satu sisi, sekolah-sekolah ini menawarkan standar pendidikan global yang dapat meningkatkan daya saing peserta didik Indonesia di kancah internasional. Namun, di sisi lain, muncul sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, seperti kesenjangan akses pendidikan antara peserta didik di sekolah SPK dan sekolah nasional, serta harmonisasi antara kurikulum internasional dan kurikulum nasional.

Sebelum diperkenalkannya Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), Indonesia telah memiliki program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). RSBI adalah program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sekolah agar setara dengan standar internasional. Sekolah-sekolah ini mengintegrasikan kurikulum nasional dengan elemen internasional, seperti penggunaan bahasa Inggris dalam mata pelajaran tertentu. Namun, program ini dihentikan pada tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap menciptakan kesenjangan sosial dan diskriminasi akibat biaya pendidikan yang tinggi dan kurangnya akses bagi peserta didik kurang mampu. (Revianur, 2019)

Sementara itu, SBI adalah sekolah yang telah memenuhi dan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) atau negara maju lainnya. Sekolah-sekolah ini memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing di forum internasional.

Setelah penghentian RSBI, pemerintah Indonesia memperkenalkan SPK melalui Permendikbud No. 31 Tahun 2014. SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi di negaranya dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI). Satuan Pendidikan Kerja Sama mengadopsi kurikulum internasional, seperti Cambridge atau International Baccalaureate (IB), sekaligus memenuhi kewajiban mengajarkan kurikulum nasional. Dengan demikian, Satuan Pendidikan Kerja Sama menawarkan pendidikan yang mengintegrasikan standar internasional dengan konteks lokal Indonesia.

Sebelum diperkenalkannya Satuan Pendidikan Kerja Sama, Indonesia telah memiliki program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). RSBI adalah program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sekolah agar setara dengan standar internasional. Sekolah-sekolah ini mengintegrasikan kurikulum nasional dengan elemen internasional, seperti penggunaan bahasa Inggris dalam mata pelajaran tertentu. Namun, program ini dihentikan pada tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap menciptakan kesenjangan sosial dan diskriminasi akibat biaya pendidikan yang tinggi dan kurangnya akses bagi peserta didik kurang mampu.

Sementara itu, SBI adalah sekolah yang telah memenuhi dan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD atau negara maju lainnya). Sekolah-sekolah ini memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing di forum internasional.

Setelah penghentian RSBI, pemerintah Indonesia memperkenalkan SPK melalui Permendikbud No. 31 Tahun 2014. SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi di negaranya dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI). SPK mengadopsi kurikulum internasional, seperti Cambridge atau International Baccalaureate (IB), sekaligus memenuhi kewajiban mengajarkan kurikulum nasional. Dengan demikian, SPK menawarkan pendidikan yang mengintegrasikan standar internasional dengan konteks lokal Indonesia.

Perbedaan utama antara SPK, RSBI, dan SBI terletak pada pendekatan dan regulasi yang diterapkan. RSBI adalah program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sekolah nasional agar setara dengan standar internasional, namun dihentikan karena isu kesenjangan sosial. SBI adalah sekolah yang telah memenuhi SNP dengan keunggulan mutu tertentu dari negara maju. Sementara itu, SPK merupakan model pendidikan yang lebih terintegrasi dengan lembaga asing, memungkinkan pengajaran berbasis kurikulum internasional secara langsung, dan diatur melalui regulasi yang lebih terstruktur.

Kesimpulannya, berdirinya SPK tidak terlepas dari keberadaan RSBI dan SBI. RSBI dan SBI merupakan inisiatif awal pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengintegrasikan elemen internasional, seperti penggunaan bahasa Inggris dan standar pendidikan global. RSBI berfokus pada sekolah yang berupaya mencapai taraf internasional, sementara SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan kualitas pendidikan lebih tinggi, mengacu pada standar internasional dari negara maju.

Namun, dengan penghentian RSBI pada 2013 akibat masalah kesenjangan sosial, pemerintah kemudian memperkenalkan SPK melalui Permendikbud No. 31 Tahun 2014. SPK menjadi langkah lebih sistematis dan terstruktur, menggabungkan kurikulum internasional, seperti Cambridge dan IB, dengan kurikulum nasional Indonesia. SPK memfasilitasi Kerja Sama antara lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan Indonesia, memastikan peserta didik mendapatkan pendidikan berstandar internasional dalam konteks lokal yang lebih teratur dan terjamin. Dengan demikian, SPK merupakan implementasi yang lebih konkret dari pendidikan berstandar internasional di Indonesia.

Dampak Satuan Pendidikan Kerja Sama Bagi Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Berdasarkan jurnal Kebijakan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls karya Shanti Kusmayanti (2019: 5) keberadaan SPK memberikan dampak signifikan terhadap sistem pendidikan nasional Indonesia, baik dari sisi aksesibilitas, keadilan, hingga orientasi pendidikan itu sendiri. Pendapat lainnya yang didapat dari hasil wawancara (kuesioner) yang dilakukan dengan Kepala Sekolah Citra Buana, Julie Purnami

Nugroho, keberadaan Satuan Pendidikan Kerja Sama sangat memberikan harapan yang cerah bagi sistem pendidikan nasional kita. Standar pendidikan yang digariskan pemerintah, terutama manajemen berbasis sekolah secara alami benar-benar terjadi dan terlaksana dengan integritas tinggi.

Ditambah lagi wawasan kebangsaan yang dijunjung tinggi, dimana keberagaman dalam falsafah *unity in diversity* benar-benar dikembangkan dan dapat dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah selain SPK, baik swasta maupun negeri. Selain itu, adanya organisasi seperti Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia, Forum Komunikasi Sekolah Swasta, dan sebagainya, menjadikan sekolah SPK mempunyai wadah untuk berbagi praktek baik. Selama ini praktek baik yang sudah kami bagikan meliputi: *Problem Based Learning*, *Thematic Learning*, *Inclusive Education*, *Progressive Pedagogy*, dan sebagainya. (Wawancara, Julie Purnami Nugroho, Juni 2025)

Hal serupa disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Manado Intercultural School, Recky. Menurut Recky, keberadaan SPK memberikan dampak positif bagi sistem pendidikan nasional Indonesia. SPK mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berkompetisi secara global. SPK memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih dan berpartisipasi dalam beberapa kejuaraan global, seperti sains, olahraga, kesenian dan sebagainya. Recky juga menambahkan bahwa SPK berkontribusi dalam membantu sekolah lain dalam hal pelatihan guru-guru, diskusi tentang fasilitas dan sebagainya. (Wawancara, Recky, Juni 2025)

Selain itu, dampak positif yang diberikan sekolah-sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama terhadap sistem pendidikan nasional adalah pengenalan budaya asing yang tentunya positif bagi peserta didik Indonesia. Menurut Kepala Akreditasi dan Pengembangan Sekolah Dyatmika, Cok Anre, SPK memiliki tingkat standar pelayanan yang biasanya sangat tinggi sehingga bisa menjadi tempat untuk belajar bagi dunia pendidikan di nasional/ swasta yang sedang berkembang dan mencari bentuknya.

Keberadaan SPK yang merupakan titik pertemuan peserta didik dari berbagai negara sedikit tidaknya membawa dampak pergeseran budaya Indonesia bagi peserta didik asli Indonesia jika sekolah tidak memberikan prioritas pada pembelajaran dan penguatan Budaya Indonesia. (Wawancara. Cok Anre, Juni 2025)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama memberikan dampak positif bagi sistem pendidikan nasional Indonesia. Berdasarkan artikel "Sekolah SPK Memberikan Pengaruh bagi Pendidikan di Indonesia" yang dipublikasikan oleh Suara.com (28 Juli 2020), kehadiran Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) memberikan pengaruh signifikan terhadap arah dan mutu pendidikan nasional di Indonesia. SPK dianggap sebagai bentuk integrasi antara pendidikan nasional dan sistem pendidikan global, yang berupaya menjawab tuntutan zaman, terutama dalam hal kualitas lulusan dan kesiapan menghadapi tantangan dunia global. (Revianur, 2019)

Pertama, SPK berperan penting dalam meningkatkan daya saing lulusan Indonesia di tingkat internasional. Dengan kurikulum campuran antara nasional dan internasional, seperti Cambridge, IB, atau Pearson Edexcel, SPK memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan kolaboratif. Hal ini menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu beradaptasi dalam lingkungan global, baik untuk studi lanjut di luar negeri maupun dalam dunia kerja internasional.

Kedua, SPK turut memperkaya sistem pendidikan nasional melalui transfer metode dan nilai-nilai pendidikan dari luar negeri. Fasilitas modern, pengajar bersertifikasi internasional, serta penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar menjadikan SPK sebagai model pembelajaran yang mendorong efisiensi, inovasi, dan kompetensi abad ke-21. Dengan demikian,

SPK bisa dijadikan sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) yang dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain di Indonesia dalam proses transformasi pembelajaran.

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi SPK adalah soal keadilan dan aksesibilitas. Karena biaya pendidikan di sekolah SPK umumnya sangat tinggi, hanya segelintir kalangan ekonomi atas yang mampu mengaksesnya. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dalam pendidikan. Pemerintah pun menyikapi hal ini dengan kebijakan seperti menghentikan pemberian tunjangan profesi guru SPK dan mengalihkannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Terakhir, SPK tetap dituntut menjalankan tanggung jawab sosial dan nasionalisme. Walaupun mengadopsi kurikulum asing, sekolah SPK wajib mengajarkan mata pelajaran wajib seperti PPKn, Bahasa Indonesia, dan Agama, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila. Di masa pandemi COVID-19, beberapa SPK bahkan aktif terlibat dalam pengabdian masyarakat, seperti proyek-proyek edukatif di desa adat, yang menunjukkan bahwa SPK tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga pada kontribusi sosial.

Dengan demikian, SPK memiliki potensi besar untuk menjadi katalisator perbaikan mutu pendidikan nasional. Namun agar SPK tidak menjadi simbol eksklusivitas dan ketimpangan, perlu adanya regulasi berkeadilan serta penguatan pengawasan agar prinsip inklusivitas dan nasionalisme dalam pendidikan tetap terjaga. Selain dampak positif yang diberikan, Sekolah Satuan pendidikan Kerja Sama juga memberikan beberapa dampak negatif. Pertama, SPK berkontribusi pada meningkatnya kesenjangan akses pendidikan di Indonesia. Model pendidikan ini, yang banyak mengadopsi kurikulum asing dan diselenggarakan dengan standar internasional, umumnya menetapkan biaya pendidikan yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan SPK hanya dapat diakses oleh kalangan menengah ke atas, sementara mayoritas masyarakat Indonesia tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menikmati layanan pendidikan tersebut. Ketimpangan ini bertentangan dengan semangat pendidikan nasional yang seharusnya inklusif dan merata bagi seluruh warga negara.

Selain itu, SPK juga mencerminkan dominasi prinsip kapitalisme dalam pendidikan. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar dan sarana pengembangan diri setiap individu, justru diperlakukan sebagai komoditas. SPK, dalam praktiknya, lebih menekankan aspek pasar dan keuntungan, dibanding tujuan pembentukan karakter dan peningkatan pengetahuan. Model seperti ini menimbulkan kekhawatiran bahwa orientasi pendidikan nasional akan semakin menjauh dari nilai-nilai dasar pendidikan bangsa yang menekankan pada humanisme, kebangsaan, dan pemerataan.

Lebih lanjut, keberadaan SPK dinilai menyimpang dari prinsip keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls, yakni *justice as fairness*. Dalam kerangka Rawlsian, keadilan pendidikan dituntut untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua individu, termasuk mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. Namun, karena SPK hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, maka prinsip ini tidak terpenuhi. Bahkan, SPK berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. (Kusmayanti, 2024: 1)

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, pemerintah diharapkan mampu membangun model pendidikan internasional yang tidak hanya memenuhi standar mutu global, tetapi juga menjamin prinsip keadilan sosial dan keberpihakan pada kelompok kurang mampu. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana meningkatkan daya saing global, tetapi juga menjadi wahana mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata dan berkeadilan.

Kesimpulannya, meskipun SPK dapat menghadirkan pendidikan berkualitas global di dalam negeri, model ini belum sepenuhnya sejalan dengan semangat keadilan sosial dan pemerataan dalam sistem pendidikan nasional. Tanpa kebijakan afirmatif dan pengawasan yang kuat, SPK justru dapat memperlebar jurang ketidaksetaraan, menjadikan pendidikan sebagai hak eksklusif, bukan hak universal.

Tantangan-tantangan Dalam Pelaksanaan Satuan Pendidikan Kerja Sama

Di dalam penyelenggaraannya, sekolah-sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama mengalami berbagai tantangan, baik dalam hal akademis maupun sosial. Menurut Kepala Sekolah Manado Intercultural School, Recky, kendala bahasa merupakan tantangan terbesar yang dihadapi peserta didik-siswi di sekolahnya. Tantangan tersebut biasa ditemui saat guru mengajar pelajaran Pendidikan Pancasila atau Kajian Indonesia kepada peserta didik yang termasuk warga negara asing (WNA), yang belum sama sekali mengerti bahasa Indonesia. Karena pelajaran ini harus diajarkan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, terkadang guru harus menyampaikan garis besar pembelajaran dalam bahasa Inggris di akhir sesi pembelajaran.

Tantangan tersebut juga dialami oleh Sekolah Citra Buana. Menurut Wakil Kepala Sekolah Citra Buana, Julie Purnami Nugroho, kendala bahasa masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama di sekolahnya. Beliau juga menambahkan bahwa jumlah jam pelajaran juga menjadi salah satu tantangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Manado Intercultural School melakukan beberapa pendekatan strategis, seperti menerapkan pembelajaran yang terintegrasi, tematik, kolaborasi, dan diferensiasi dalam kegiatan pembelajarannya.

Tantangan berbeda dihadapi oleh peserta didik-siswi di Sekolah Dyatmika. Menurut Cok Anre, tantangan terbesar dalam penyelenggaraan SPK di Sekolah Dyatmika adalah dalam hal pengelolaan jumlah jam belajar untuk mata pelajaran nasional yang harus sesuai dengan aturan kurikulum Merdeka. Selain itu, tantangannya adalah menyediakan guru yang berlatar belakang pendidikan yang linier dengan tiga mata pelajaran wajib, yaitu Bahasa Indonesia, Agama dan Pendidikan Pancasila. Guru-guru tersebut dituntut memiliki kualitas mengajar yang sesuai dengan standar pembelajaran yang tinggi di sekolah SPK, terutama penguasaan bahasa Inggris, metode pembelajaran yang inovatif, dan pemahaman terhadap kurikulum internasional

Berdasarkan keterangan di atas, SPK dalam perkembangannya menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan bervariasi, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun administratif. Berdasarkan temuan dari tiga sekolah SPK, tantangan-tantangan tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga tema besar: (1) kendala bahasa dan pembelajaran lintas budaya, (2) pengelolaan kurikulum nasional dan internasional, serta (3) ketersediaan dan kualitas tenaga pengajar.

1. Kendala Bahasa dan Pembelajaran Lintas Budaya

Kendala bahasa merupakan isu utama yang sering muncul dalam konteks SPK, terutama karena banyak peserta didik yang merupakan warga negara asing (WNA) dengan keterbatasan dalam berbahasa Indonesia. Seperti dijelaskan oleh Recky, Kepala Sekolah Manado Intercultural School, peserta didik yang berstatus WNA di sekolahnya mengalami kesulitan saat mengikuti pelajaran yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia seperti Pendidikan Pancasila dan Kajian Indonesia, karena pelajaran ini harus disampaikan dalam bahasa Indonesia sesuai regulasi. (Wawancara, Recky, Juni 2025).

Untuk mengatasi masalah bahasa ini, guru sering kali harus memberikan penjelasan ulang dalam bahasa Inggris di akhir sesi pembelajaran. Hal ini menunjukkan adanya tantangan pedagogis, di mana guru harus mampu berperan sebagai mediator budaya dan bahasa, serta menyusun strategi bilingual agar tujuan pembelajaran tetap tercapai tanpa mengesampingkan regulasi nasional. Sekolah Citra Buana juga mengalami tantangan serupa. Wakil Kepala

Sekolahnya, Julie Purnami Nugroho, menyoroti bahwa kendala bahasa bukan hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga berdampak pada efektivitas pengajaran guru lokal kepada peserta didik internasional. Tantangan ini mencerminkan kebutuhan akan keterampilan interkultural dan linguistik dalam lingkungan belajar yang sangat heterogen.

2. Pengelolaan Kurikulum Nasional dan Internasional

Selain kendala bahasa, pengelolaan waktu belajar menjadi tantangan besar lainnya. Sekolah-sekolah SPK wajib menyelenggarakan mata pelajaran nasional seperti Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, dan Agama sesuai dengan aturan dari Kemendikbud Ristek, di samping menjalankan kurikulum internasional (seperti Cambridge, IB, dan sebagainya).

Menurut Cok Anre dari Sekolah Dyatmika, tantangan utama adalah menyusun jadwal belajar yang mampu mengakomodasi kedua sistem kurikulum secara seimbang. Hal ini sering menimbulkan tekanan waktu, baik bagi guru maupun peserta didik, terutama dalam memastikan ketercapaian kompetensi dasar dari kurikulum nasional tanpa mengurangi kualitas dari kurikulum internasional.

Situasi ini memerlukan manajemen kurikulum yang fleksibel dan adaptif, serta pemahaman mendalam terhadap regulasi pendidikan Indonesia agar sekolah tetap patuh hukum tanpa mengorbankan keunggulan program internasional mereka.

3. Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Pendidik

Tantangan lainnya adalah terkait sumber daya manusia, terutama dalam hal ketersediaan guru dengan latar belakang pendidikan yang sesuai (linier) dan berstandar internasional. Cok Anre menekankan pentingnya merekrut guru yang mampu mengajar mata pelajaran nasional, namun juga memiliki kemampuan pedagogis modern, penguasaan bahasa Inggris, serta pemahaman terhadap kurikulum internasional

Hal ini menunjukkan bahwa sekolah SPK tidak hanya membutuhkan guru yang memenuhi syarat administratif nasional, tetapi juga menuntut guru yang kompeten dalam pendekatan global dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan internasional dalam proses belajar mengajar. Sekolah-sekolah seperti Manado Intercultural School mencoba mengatasi ini dengan menerapkan strategi pembelajaran tematik, integratif, kolaboratif, dan berdiferensiasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan mengenai Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Indonesia periode 2014–2020, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berdirinya SPK

Pembentukan SPK di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berstandar global. Setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan program RSBI/SBI pada tahun 2013, pemerintah menetapkan Permendikbud No. 31 Tahun 2014 sebagai dasar hukum pendirian SPK. Sekolah-sekolah yang sebelumnya menggunakan label “internasional” bertransformasi menjadi SPK dengan persyaratan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih jelas. Faktor globalisasi, meningkatnya keinginan orang tua terhadap pendidikan berkualitas tinggi, serta kebutuhan akan daya saing generasi muda Indonesia di tingkat global juga menjadi pendorong utama berdirinya SPK.

2. Dampak SPK terhadap Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Keberadaan SPK memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. SPK mendorong adopsi pendekatan pembelajaran yang inovatif, seperti project-based learning, inclusive education, dan progressive pedagogy. SPK juga menjadi contoh penerapan manajemen berbasis sekolah yang efektif. Selain itu, SPK memperkenalkan budaya global di ruang kelas, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbahasa Inggris, dan membuka peluang pendidikan internasional yang lebih luas.

3. Tantangan dalam Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama

Sekolah-sekolah yang berstatus Satuan Pendidikan Kerja Sama menghadapi tantangan kompleks baik dalam aspek akademis, administratif, maupun kultural. Secara akademis, kendala utama terletak pada integrasi kurikulum nasional dengan kurikulum internasional, serta pengelolaan jam pelajaran untuk memenuhi kedua standar tersebut. Kendala bahasa juga menjadi tantangan besar, khususnya dalam menyampaikan mata pelajaran wajib seperti Pendidikan Pancasila, Agama, dan Bahasa Indonesia kepada peserta didik asing. Selain itu, tantangan lain adalah keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki latar belakang linier, penguasaan kurikulum internasional, dan kemampuan bilingual. Administratif dan birokrasi perizinan SPK juga masih menjadi hambatan yang perlu ditangani secara strategis oleh pemangku kebijakan.

Secara keseluruhan, keberadaan SPK mencerminkan upaya pemerintah dalam merespons globalisasi pendidikan sambil tetap menjaga nilai-nilai nasional. SPK berpotensi menjadi model pendidikan hibrida yang adaptif terhadap perubahan zaman, asalkan tetap dikelola dengan regulasi yang adil, inklusif, dan berpihak pada mutu serta pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

REFERENSI

- Abdul, dkk. (2019). *Perspektif Pendidikan Indonesia di Era Globalisasi*. Tangerang: Media Edukasi Indonesia
- Abdurahman, Dudung. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media
- Admin. (2022). "Sejarah Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia". SPK Indonesia, 13 April 2022, <https://www.spkindonesia.org/history>
- Ali, Mohammad. (2012). *Menyemai Sekolah Bertaraf Internasional*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Andriyanto, Octo Dandy, dkk. (2021) Tantangan dan Strategi Pembelajaran BIPA bagi Pembelajar Anak-anak di Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama. *Metalingua: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* Vol. 6 No. 2, [researchgate.net/publication/356707067_Tantangan_dan_Strategi_Pembelajaran_BIP_A_bagi_Pemelajar_Anak-Anak_di_Sekolah_Satuan_Pendidikan_Kerja_Sama](https://www.researchgate.net/publication/356707067_Tantangan_dan_Strategi_Pembelajaran_BIP_A_bagi_Pemelajar_Anak-Anak_di_Sekolah_Satuan_Pendidikan_Kerja_Sama)
- Arika, Yovita. Guru di Satuan Pendidikan Kerja Sama Pertanyakan Penghapusan Tunjangan Profesi. *Kompas*, 11 Januari 2021. [kompas.id/baca/dikbud/2021/01/11/guru-di-satuan-pendidikan-Kerja-Sama-pertanyakan-penghapusan-tunjangan-profesi](https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/01/11/guru-di-satuan-pendidikan-Kerja-Sama-pertanyakan-penghapusan-tunjangan-profesi)
- Asha, Lukman. (2020). *Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional*. Bengkulu: Literasologi.
- Dharmaningtyas, Dewi Sendhikasari. Penghapusan Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. *Jurnal Politica* Vol. 4 No. 2 November 2013
- Fahlevi, Fahdi. Serba Serbi SPK: Dari Kurikulum Internasional Hingga Standar Tinggi Pengajar. *Tribun News*, 24 Juli 2020
[tribunnews.com/pendidikan/2020/07/24/serba-serbi-spk-dari-kurikulum-internasional-hingga-standar-tinggi-pengajar](https://www.tribunnews.com/pendidikan/2020/07/24/serba-serbi-spk-dari-kurikulum-internasional-hingga-standar-tinggi-pengajar)
- Fauzan. (2017). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Tangerang Selatan: GP Press
- Febrinastri, Fabiola. (28 Juli 2020). "Sekolah SPK Memberikan Pengaruh bagi Pendidikan di Indonesia." Diakses dari: <https://doi.org/10.4324/9781315772687-1>

- www.suara.com/news/2020/07/28/201659/sekolah-spk-memberikan-pengaruh-bagi-pendidikan-di-indonesia?page=all
- Gunaran, Rudy & Lelly Qodariah. (2011). Pendidikan Dalam Membangun Masa Depan Bangsa. Jakarta: UHAMKA Press
- Hartawan, Roli Fola Cahya. (2024). Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia (1947-2024). Malang: CV Literasi Nusantara Abadi
- Hendriani & Nadya. Mengapa Memilih Sekolah Internasional? (Studi Kasus Pengambilan Keputusan Orang Tua Dalam Pemilihan Sekolah Untuk Anak). INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi Vol. 9 No. 1, Juli 2018
- Kasmida, dkk. Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, Kompetensi Interpersonal terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama. Jurnal Pendidikan Glasser, vol. 6, no. 1, 2022, pp. 75-88, doi:10.32529/glasser.v6i1.1245
- Kuntowijoyo. (2003). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Kusmayanti, Shanti. (2024). Kapitalisme Pendidikan di Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) dalam Perspektif Teori Keadilan. Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5, no. 11, japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/download/5923/1436/11843
- Masykur. (2019). Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja
- Mengenal Sekolah SPK, Satuan Pendidikan Kerja Sama. BPK Penabur, 1 September 2020. bpkpenabur.or.id/cities/jakarta/berita/berita-lainnya/mengenal-sekolah-spk-satuan-pendidikan-Kerja-Sama
- Nurhayati, dkk. (2022). Pengembangan Kurikulum. Lombok: Hamjah Diha Foundation
- Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 407/D/PP/2015. spkindonesia.org/docs/PERDIRJENDIKDASMEN_NO_407-D-PP-2015_Juknis_Kerja_Sama_SPK_13.11.2015.pdf
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, pskp.kemendikdasmen.go.id/assets_front/images/produk/1-gtk/buku/Penyelenggaraan_dan_Pengelolaan_Satuan_Pendidikan_Kerja_Sama.pdf
- Purnami, Julianti Hadi, dkk. (2020) Strategi Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Dalam Menegakan Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Jurnal Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, ejournal.uki.ac.id/index.php/jmp/article/view/3008/1898
- Qiso, Ahmad Abdul, dkk. Dinamika regulasi sekolah berstandar internasional di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam Ta'dibuna Vol. 12 No. 4, Agustus 2023. ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TADIBUNA/article/view/14479
- Rahayu, Sulathi, dkk. (2023). Manajemen Kurikulum Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Sekolah Dasar High Scope Indonesia kota Palembang. Educational Leadership and Management Journal(Element)Vol.1, No.1, November 2023, pp. 1~14.
- Revianur, Aditya. RSBI dan SBI Jadi Sekolah Biasa. Kompas.com, 8 Januari 2013. edukasi.kompas.com/read/2013/01/08/18233422/rsbi.dan.sbi.jadi.sekolah.biasa?utm_source
- Satuan Pendidikan Kerja Sama. (2019). Jakarta: PAUD Dikdasmen: 2019. pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/satuan-pendidikan-Kerja-Sama
- SPK Kedepankan Pendidikan Karakter dan Nasionalisme Kebangsaan. (2015). Jakarta: PAUD Dikdasmen, pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/media-berita/spk-kedepankan-pendidikan-karakter-dan-nasionalisme-kebangsaan

- Sujarwanto, dkk. (2024). *Konsep dan Pengembangan Sekolah Internasional*. Surabaya: Cipta Media Nusantara
- Suparlan, Henricus. (2014). *Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia*. Fakultas Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada: *Jurnal Filsafat*, 25(1), 56.
- Suparman, Heru, dkk. (2023). *Teori dan Prinsip Pendidikan*. Jakarta: Unindrapress
- Supatmin, dkk. (2021). *Manajemen Kurikulum Dan Sistem Penilaian Pendidikan Satuan Pendidikan Kerja Sama (Studi Empirik Pada SPK Kota Tangerang Selatan)*. *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis* Vol. 6 Tahun 2021. openjournal.unpam.ac.id/index.php/Eduka/article/view/11075/pdf
- Suyanto, Slamet. (2010) *Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional Melalui Organisasi Belajar: Konsep dan Implementasi*. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, [S.l.], n. 3, june 2010. journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/323/pdf
- PT. Trans Intra Asia. *Evaluasi Sekolah Bertaraf Internasional*. *Jurnal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, repositori.kemdikbud.go.id/8482/1/ACDP020%20-%20Evaluasi-Sekolah-Bertaraf-Internasional.pdf
- Triwiyanto, Teguh & Ahmad Yusuf Sobri. (2010). *Panduan Mengelola Sekolah Bertaraf Internasional*. Yogyakarta: Ar Ruzz
- Widanti, Ni Putu Tirka. (2022). *Implementasi Kebijakan Interdependensi Fakta-Nilai Dalam Proses Penginputan Data Pokok Pendidikan di Satuan Pendidikan Kerja Sama Green School Bali*. *JURNAL PAPTUNG* Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022. doi.org/10.54783/japp.v5i1.559
- Widodo, dkk. (2017). *Penyelenggaraan dan Pengelolaan Satuan Pendidikan Kerja Sama*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud
- Wulaningrum, dkk. (2025). *Manajemen Kurikulum Satuan Pendidikan Kerja Sama sebagai Upaya Peningkatan Pendidikan Perspektif Global (Studi Kasus SD Sampoerna Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan)*. *Journal on Education*, Volume 07, No. 02 Januari-Februari 2025
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. pusdiklat.perpusnas.go.id/regulasi/download/6
- Zebua, Rony S. Y. (2020). *Potret Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa (sejak kurikulum Tahun 1947 hingga sekarang)*. Bandung: Universitas Islam Bandung